



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI PERBENDAHARAAN
GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO III LANTAI 3, JALAN WAHIDIN JAKARTA 10710 KOTAK POS 1139
TELEPON 021-3516980 EXT. 5237 FAKSIMILI 021-3864784

Nomor : S-5561 /PB.8/2018
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Implementasi VPN Forti dan Penonaktifan VPN
Cisco di lingkungan Ditjen Perbendaharaan

16 Juli 2018

Yth. 1. Sekretaris Ditjen Perbendaharaan;
2. Para Direktur;
3. Para Kepala Kanwil;
4. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
Lingkup Ditjen Perbendaharaan

Sehubungan dengan Surat Kepala Pusintek No. S-213/IT/2018 tanggal 12 Juli 2018 hal Percepatan Implementasi Virtual Private Network (VPN) Forti dan Penonaktifan VPN Cisco di Lingkungan Kementerian Keuangan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggunaan VPN Cisco di Lingkungan Kementerian Keuangan akan dinonaktifkan selambat-lambatnya tanggal 31 Juli 2018 karena perangkat merupakan produk lama yang sudah tidak didukung dari penyedia;
2. Untuk akses VPN Kementerian Keuangan selanjutnya akan menggunakan VPN Forti yang saat ini sudah aktif dan dapat digunakan;
3. Petunjuk penggunaan VPN Forti terlampir serta dapat diunduh melalui jaringan intranet pada alamat: <http://pusintek.kemenkeu.go.id/knowledge/default.aspx>. Apabila terdapat kendala dalam akses VPN Forti agar dapat menghubungi Service Desk Pusintek melalui alamat email: servicedesk@kemenkeu.go.id dengan nomor telepon (021) 3451165, 27025900, 3447939 Ext. 4100 Fax (021) 3519655 atau melalui HAI DJPB;
4. Berdasarkan hal-hal tersebut, dimohon kepada seluruh pengguna VPN Kementerian Keuangan agar dapat beralih menggunakan VPN Forti sesuai petunjuk pada poin 3 diatas.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur,


Sudarto
NIP 196904091989121001



STEP

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI KEUANGAN

GEDUNG SYAFRUDIN PRAWIRANEGARA LT.1-3, JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4 JAKARTA 10710, KOTAK
POS 21 TELEPON (021) 3846518, 3524707, FAKSIMILE (021) 3451231, SITUS <http://pusintek.kemenkeu.go.id>

Nomor : S- 213 /IT/2018
Sifat : Segera
Hal : Percepatan Implementasi VPN Forti dan Penonaktifan
VPN Cisco di Lingkungan Kementerian Keuangan

12 Juli 2018

Yth. Terlampir
Jakarta

Sehubungan dengan tindak lanjut pengelolaan akses VPN di lingkungan Kementerian Keuangan, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat BSSN dengan nomor 200/KBSSN/PP.01/06/02/2018 bahwa VPN Cisco harus dinonaktifkan karena perangkat merupakan produk lama yang sudah tidak didukung dari penyedia sehingga menimbulkan kerentanan dan berpotensi adanya celah keamanan pada perangkat tersebut;
2. Jumlah pengguna VPN Kemenkeu yang saat ini akses melalui VPN Cisco kurang lebih sebanyak 250 pengguna dan akses melalui VPN Forti sebanyak 441 pengguna;
3. Telah dilakukan rapat koordinasi pada tanggal 9 Mei 2018 sekaligus pendampingan implementasi VPN Forti dan evaluasi penerapan VPN Forti di lingkungan Kementerian Keuangan yang menunjukkan bahwa akses melalui VPN Forti telah stabil dan performansinya sangat baik;
4. Petunjuk penggunaan VPN Forti dapat diunduh melalui jaringan intranet pada alamat pusintek.kemenkeu.go.id/Knowledge/default.aspx. Apabila terdapat kendala dalam akses VPN Forti, agar segera menghubungi *Service Desk* Pusintek melalui alamat e-mail: servicedesk@kemenkeu.go.id dengan nomor telepon (021) 3451165, (021) 27025900, (021) 3447030 Ext:4100, Fax (021)3519655;
5. Berdasarkan hal-hal di atas, diminta bantuan Saudara untuk mengimbau pengguna VPN di unit Saudara agar segera beralih dari akses melalui VPN Cisco dengan alamat vpn1.kemenkeu.go.id/vpn2.kemenkeu.go.id ke VPN Forti dengan alamat vpn.kemenkeu.go.id sebagai langkah percepatan implementasi VPN Forti di seluruh Unit Kementerian Keuangan, mengingat VPN Cisco direncanakan akan dinonaktifkan selambat-lambatnya pada tanggal 31 Juli 2018.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pusat,



Herry Siswanto
NIP 19710322199603 1 002

Tembusan :

1. Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Keuangan;
2. Staf Khusus Bidang Sistem Informasi dan Teknologi.

Lampiran

Nomor : S-213/IT/2018

Tanggal : 12 Juli 2018

Yth.

1. Direktur Sistem Penganggaran, DJA
2. Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan, DJPB
3. Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi, DJKN
4. Direktur Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah, DJPK
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Risiko, DJPPR
6. Sekretaris Inspektorat Jenderal, ITJEN
7. Sekretaris Badan Kebijakan Fiskal, BKF
8. Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, BPPK
9. Deputi Bidang Pengembangan dan Operasional Sistem, PP INSW
10. Inspektur VII, ITJEN